

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. (Jakarta:Kencana 2021).
- R. Soeroso, S.H., *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi*, 223 (Sinar Grafika,2013).
- Angin, Effendi Perangin. *Hukum Agraria di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo, 1999).
- Tihami & Sahrani, Sobari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 179
- Yahya, M. Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Edisi Kedua. (Jakarta:Sinar Grafika,2017) hal. 282
- Hadikusuma, Hilman , *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan 1 (Bandung: Mandar Maju,1990) hlm. 123
- Anwar, H. A. K. Moch. *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. (Bandung: Alumni, 2002).
- Soimin,Soedharyo *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, (Jakarta:Sinar Grafika) hlm.26

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 1996).

Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) hlm. 34

Bakhri, Syaiful. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Cetakan I. (Jakarta: P3IH & Fakultas Hukum UMJ, 2009).

Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

_____. *Unsur-Unsur yang Dapat di Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).

Marwan, M. *Kamus Hukum*. (Surabaya: Reality Publisher, 2009).

Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi (Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya)*. (Bandung: PT Alumni, 2007).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. (Bandung : Sumur, 1962).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-8. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. (Jakarta: UI Press, 2008).

Suradi. *Korupsi dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*. Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Gava Media, 2006).

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

Wiryo, R. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. (Bandung: Alumni, 2003).

Yanuar, Purwaning. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Bandung: Alumni, 2007).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)*.

_____. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*

2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

_____. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).*

_____. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).*

_____. *Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6401).*

C. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia. kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religius.
(Diakses 27 Maret 2022)

Puspa, Yan Pramdya. *Kamus Hukum; Edisi Lengkap*. (Jakarta: Aneka Ilmu, 1977).

Soedarsono. *Kamus Hukum*. Cetakan ke-1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

D. Jurnal

Devi, Tjokorda Istri Agung Adintya & Parwata, I Gusti Ngurah. Harta Benda Yang Tidak Dapat Disita Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 9 No. 10 Tahun 2020, hlm. 1-11

Sugiono Agus, Yudianto Otto, Herlin Setyorini Erny. Pengembalian Harta Terpidana Koruptor Setelah Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap. *Jurnal Universitas 17 Agustus*. Vol 22, No 1 Tahun 2021

Darwis, Nurley. Penyitaan Harta Dalam Perkara Korupsi. *Universitas Surya Darma*. Tahun 2020

Ambrosius Adjie, Peletakan Sita Jaminan Atas Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Universitas Parahyangan*. Vol.1, No.2 Tahun 2015

Bandingkan, Sudjana, Hak Cipta sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak dikaitkan dengan Pengembangan Obyek Fidusia, *Jurnal Mimbar Hukum UGM*, Volume 24, Nomor 3, 406-407, 2012.

Sujayadi dan Yuniarti, Pelaksanaan Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Arbitrase, *Yuridika*: Volume 25 No 1, Januari-April 2010, 75, 82-84, 2010.

David Adrian, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Hak Tanggungan Dari Upaya Sita Jaminan Oleh Pihak Ketiga, *Lex Privatum*, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014. 144, 152 (2014)

E. Artikel

Ardisasmita, M. Syamsa. Definisi Korupsi Menurut Prespektif Hukum Dan E-nnouncement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang LebihTerbuka, Transparan Dan Akuntabel. Jakarta. 2008